Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2024, hlm. 776 - 778
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.176

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

PENGURUSAN IZIN BONGKAR DAN MUAT KAPAL ASING DI LUAR KAWASAN PABEAN PADA KANTOR BEA DAN CUKAI OLEH PT.BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BELAWAN

[1]Suratni Ginting, [2]Budi Setiawan

[1]Nautika,[2] KPNK , Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: suratniginting68@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean pada kantor bea dan cukai , pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada pihak bersangkutan. Dikarenakan pelaksanaan bongkar dan muat kapal asing diluar kawasan pabean yang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan merupakan suatu tindak pidana yang dimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Dikarenakan adanya kongesti pada pelabuhan maka kapal disandarkan diluar kawasan pabean dengan syarat-syarat tertentu. Namun terdapat beberapa kendala pada saat perizinan bongkar dan muat diluar kawasan pabean yaitu berupa keterlambatan pembongkaran yang menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang terkait dalam pembongkaran. Perlunya koordinasi dan ketelitian dalam pengurusan izin bongkar dan muat diluar kawasan pabean. Peran PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan untuk perizinan bongkar dan muat luar kawasan pabean ini sangatlah penting karena melalui PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kapal yang akan sandar di luar kawasan pabean yang diageni nya. Perizinan bongkar dan muat kapal diluar kawasan sangatlah penting bagi pihak yang ikut dalam kegiatan bongkar dan muat agar tidak terjadinya tindak pidana yang ditujukan kepada penanggungjawab pihak bongkar dan muat kapal .Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala yang diisebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam prosedur penginputan izin mengggunakan system SIBELA. Keterlambatan pemilik barang mengirim dokumen syarat bongkar muat di luar kawasan pabean, keterlambatan pengajuan izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean yang menjadi hambatan keterlambatan peng approve izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean.

Kata Kunci: Pengurusan, Izin Bongkar Muat, Di Luar Kawasan Pabean.

Abstract

To understand the process of processing permits for loading and unloading foreign ships outside the customs area at the customs and excise office, the implementation of loading and unloading outside the customs area must have permission from the relevant party. Because the loading and unloading of foreign ships outside the customs area without permission from the party concerned is a criminal act which is regulated in Article 102 letter (b) of Law No. 17 of 2006 concerning customs. Due to congestion at the port, the ship is docked outside the customs area with certain conditions. However, there are several obstacles when permitting loading and unloading outside the customs area, namely delays in unloading which cause losses to the parties involved in the unloading. The need for coordination and accuracy in processing permits for loading and unloading outside the customs area. The role of PT. Bahari Eka Nusantara Belawan Branch for loading and unloading permits outside the customs area is very important because it goes through PT. Bahari Eka Nusantara Belawan Branch is the party responsible for ships that will dock outside the customs area under their agency.

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2024, hlm. 776 - 778
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.176

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

Permits for loading and unloading ships outside the area are very important for parties involved in loading and unloading activities to avoid criminal acts directed at those responsible for loading and unloading ships. The results of the discussion can be concluded that there are still obstacles caused by a lack of understanding in the procedures for inputting permits. using the SIBELA system. Delays in goods owners sending documents required for loading and unloading outside the customs area, delays in applying for permits for loading and unloading outside the customs area which are obstacles to delays in approving permits for loading and unloading foreign ships outside the customs area.

Keywords: *Management, Loading and Unloading Permits, Outside Customs Area.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tindakan pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang datang maupun keluar daerah pabean dapat dilakukan di tempat lain diluar kawasan pabean dengan izin dari kepala kantor yang mengawasi disertai dengan surat permohonan secara tertulis. Permohonan ini disertai dengan beberapa alasan mengapa tidak dilakukannya pembongkaran di kawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan pabean atas barang apa yang diangkut yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa di dalam ketentuan tersebut yang terdapat pada Pasal 102 huruf (b) bahwa "Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean" merupakan suatu tindak pidana dimana ketentuan ini dimaksudkan bagi barang impor yang masih dalam pengawasan pabean berupa barang impor yang kewajiban pabeannya belum terselesaikan .

Pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada pihak bersangkutan. Keterlambatan penerbitan izin bongkar di luar kawasan pabean pada kantor bea dan cukai adalah masalah yang di hadapi oleh PT. Bahari Eka Nusantara.

METODE PENELITIAN

Metode data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan makalah ini , penulis menggunakan dua (2) metode guna mempermudah penulisan makalah dan agar dapat dipahami serta dimengerti oleh pembaca .Metode yang digunakan adalah :

A. Metode Lapangan (*Field Reasearch)*

Dalam metode ini penulis mengamati secara langsung dan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa orang yang memiliki hubungan kerja terkait dalam Pengurursan Izin Bongkar Dan Muat Di Luar Kawasan Pabean serta ikut dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai belawan pada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan.

B. Metode Pustaka (*Library Reasearch*)

Melalui metode ini penulis mendapatkan data dengan cara membaca atau mempelajari buku –buku dan yang ada diperpustakaan, dan mengambil refensi dari jurnal –jurnal yang berkaitan dengan makalah ini.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui "Pengurusan Izin Bongkar Muat Kapal Asing Di Luar Kawasan Pabean Di Kantor Bea Dan Cukai Belawan"
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam menangani Izin Bongkar Muat Kapal Asing Di Luar Kawasan Pabean Di Kantor Bea Dan Cukai Belawan oleh PT. Bahari Eka Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Data

Prosedur perizinan bongkar dan muat di luar kawasan pabean melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi untuk memastikan kelengkapan adminstrasi yang harus di penuhi. Berikut adalah prosedur pengurusan izin bongkar dan muat Kapal Asing di luar kawasan pabean :

Agent menginformasikan kepada *shipper* bahwa akan melakukan penyandaran dan pembongkaran di luar kawasan pabean dan a*gent* akan meminta dokumen dokumen terkait yang akan di lampirkan pada permohonan izin luar kawasan pabean yaitu ;

Ship Particular, Manifest,Master Sailing,Packing List,Commercial Invioce ,Bill Of Lading yang berisikan lengkap data –data kapal seperti :

Nama pengirim dan penerima barang :
Nama kapal :
Asal dan tujuan pengiriman :
Pelabuhan muat dan bongkar :
Data muatan :
Rincian *freight :*
Deskripsi barang yang termuat di dalam pengiriman :

Agent mengajukan permohonan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pada otoritas pelindo dengan melampirkan dokumen :Surat permohonan dan *Shipping Intruction* , juga terhadap pabean di system SIBELA dan

melampirkan dokumen surat permohonan bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan Pabean.

Kemudian *Agent* submit permohonan izin bongkar muat barang berbahaya (BMBB)

Kemudian petugas Bea Dan Cukai Belawan memeriksa permohonan yang telah di ajukan *agent* melalui *system* SIBELA, apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka petugas Bea Dan Cukai akan menyetujui permohonan tersebut .

Kemudian petugas Bea Dan Cukai Utama Belawan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan bahaya, apabila dalam keadaan baik maka petugas Bea Dan Cukai Belawan akan menerbitkan Surat Izin Bongkar Muat Di Luar Kawasan Pabean di*System* SIBELA

Agent akan mencetak surat izin bongkar muat barang berbahaya dan menyerahkan kepada Nakhoda di atas kapal sebagai surat yang akan di tunjukkan kepada petugas yang patroli di Pelabuhan.

B. Hambatan Yang Di Alami Dalam Pengurusan Izin Bongkar dan Muat Kapal Asing di Luar Kawasan Pabean Pada Kantor Bea Dan Cukai Oleh PT.Bahari Eka Belawan

1. Kurang pemahaman tentang Prosedur Perizinan Bea Dan Cukai.
2. Keterlambatan Agent dalam pengurusan Izin
3. Keterlambatan pemilik barang dalam mengirim dokumen

C. Pemecahan Masalah

Seluruh staf operasional keagenan harus Cakap dalam peng inputan dokumen dan dalam pengajuan di system SIBELA, menjaliin komunikasi yang baik dengan para petugas ,supaya pihak *agent* selalu menginformasikan permohonan agar tidak mengalami keterlambatan peng *approve* pan oleh petugas. Dan sebagai pemilik barang agar dokumen yang dibutuhkan dikirim tepat waktu, supaya tiidak menimbulkan hal – hal yang dapat menghambat proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai belawan pada PT.Bahari Eka Nusantara .

KESIMPULAN

Pengurusan Izin Bongkar Dan Muat Kapal Asing Di Luar Kawasan Pabean di kantor Bea dan Cukai pada PT. Bahari Eka Nusantara umumnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, akan tetapi masih terdapat terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam prosedur penginputan Izin mengggunakan *system* SIBELA.

DAFTAR PUSTAKA

Khairuman, K., Taruna, T., & Hutauruk, R. O. (2021). Proses Pengurusan Muatan Angkut Lanjut Dan Diangkut Terus Khusus Wilayah *Free Trade Zone (Ftz)* Pada Pt. Snepnac Shipping Batam.*Journal of Maritime and Education (JME), 3(2), 272-277.*

Ginting, D. ., H.Togatorop, T. ., & Vianus Marbun, Y. . (2024). Pemasukan Alat Bongkar Muat Kapal Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Batam Pada Pt. Golden Gate Mandiri Batam. *Journal of Maritime and Education* (JME), 6(1), 635 - 638.

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa di dalam ketentuan tersebut yang terdapat pada Pasal 102 huruf (b) bahwa “Membongkar barang *impor* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.